

JURNAL

**PROFIL KELEMBAGAAN DAN KAJIAN KINERJA
PENYULUHAN DI UPTD HAMA PENYAKIT TANAMAN
DAN KESEHATAN HEWAN KECAMATAN JONGGAT**



Oleh:

Rizky Hayati

C1G016193

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MATARAM
2022**

**PROFIL KELEMBAGAAN DAN KAJIAN KINERJA PENYULUHAN DI
UPTD HAMA PENYAKIT TANAMAN DAN KESEHATAN HEWAN
KECAMATAN JONGGAT**

***INSTITUTIONAL PROFILE AND STUDY OF EXTENSION PERFORMANCE
AT UPTD PEST PLANT DISEASES AND ANIMAL HEALTH JONGGAT
DISTRICT***

Rizky Hayati¹, I Wayan Suadnya²; dan Arifuddin Sahidu³

^{1,2,3} Program Studi Agribisnis, Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia

*Email; Rizkyhayati997@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui profil kelembagaan UPTD Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Jonggat, (2) Mengetahui kinerja penyuluhan di Wilayah Kerja UPTD Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Jonggat. Penelitian dilakukan di wilayah kerja UPTD Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan (UPTD HPT dan Keswan) Kecamatan Jonggat, dari 13 desa binaan dipilih hanya 3 desa. Jumlah responden yaitu sebanyak 48 orang, 3 responden penyuluh dan 45 responden petani yang menjadi kelompok binaan penyuluh, serta 1 orang koordinator penyuluh sebagai *key informant*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Profil kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa secara struktur sudah cukup jelas karena sudah ditata dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, meskipun terjadi beberapa perubahan karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat kabupaten yaitu Dinas Pertanian yang di dalamnya terdapat bidang penyuluhan, dan pada tingkat kecamatan berbentuk UPTD Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Jonggat yang salah satu unitnya yaitu unit penyuluhan yang mendukung bagi terlaksananya pengelolaan organisasi penyuluhan yang efektif. Selain itu data hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kelembagaan penyuluhan didukung dengan sumber daya manusia yang handal meskipun hanya didukung dengan anggaran yang terbatas dalam merealisasikan kegiatan penyuluhan. (2) Hasil analisis terhadap kinerja penyuluhan menunjukkan bahwa kinerja penyuluhan di UPTD HPT dan Keswan Kecamatan Jonggat adalah termasuk dalam kategori baik pada tiap tahapannya yang ditunjukkan oleh berlangsungnya proses perencanaan penyuluhan yang partisipatif, implementasi rencana yang cukup efektif, serta adanya kegiatan evaluasi dan pelaporan hasil penyuluhan yang dilakukan.

Kata kunci: Profil Kelembagaan dan Kinerja Penyuluhan

ABSTRACT

This study aims to: (1) determine the institutional profile of the UPTD for Pests of Plant Diseases and Animal Health in Jonggat District, (2) determine the performance of extension services in the Working Area of the UPTD for Plant Disease Pests and Animal Health in Jonggat District. The research was conducted in the working area of the UPTD for Pests, Plant Diseases and Animal Health (UPTD HPT and Keswan) in Jonggat District, only 3 villages were selected from the 13 assisted villages. The number of respondents was 48 people, 3 respondents were extension workers and 45 respondents were farmers who became the instructors' groups, and 1 extension coordinator was the key informant.

The results of the study show that: (1) The profile of extension institutions in Central Lombok Regency shows that the structure is quite clear because it has been well organized based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. Government extension institutions at the district level are the Department of Agriculture which includes extension services, and at the sub-district level it is in the form of UPTD for Pests, Plant Diseases and Animal Health, Jonggat District, one of which is an extension unit that supports the implementation of effective management of extension organizations. In addition, the research data also shows that extension institutions are supported by reliable human resources, although they are only supported by a limited budget in realizing extension activities. (2) The results of the analysis of the extension performance showed that the extension performance in UPTD HPT and Keswan Jonggat District was included in the good category at each stage which was indicated by the ongoing participatory extension planning process, the implementation of the plan which was quite effective, as well as the evaluation and reporting of results. counseling carried out.

Keywords: Institutional Profile and Extension Performance

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar dalam pembangunan nasional, baik berupa peningkatan ketahanan pangan nasional, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka untuk membangun kemandirian pangan, pemerintah memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian untuk meningkatkan produksi petani dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembangunan pertanian tergantung pada pemahaman tentang pembangunan itu sendiri dan dari keterampilan khusus yang dimiliki orang-orang yang melakukan berbagai pekerjaan serta kegiatan dalam membangun pertanian. Sumber daya manusia (SDM) pertanian yang tangguh dengan ciri profesional, mandiri, inovatif, kreatif dan berwawasan global yang mampu menjadi fasilitator, motivator dan regulator pelaku usaha pertanian serta mampu membangun sistem agribisnis yang berdaya saing tinggi sangat diharapkan untuk keberhasilan pembangunan pertanian.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan SDM pertanian, terutama SDM petani, adalah melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan pertanian, masyarakat pertanian dibekali dengan ilmu, pengetahuan, keterampilan, paket-paket teknologi baru di bidang pertanian dengan sapa usahanya. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), peranan Penyuluh Pertanian menjadi semakin strategis dalam memfasilitasi proses pemberdayaan petani dan keluarganya. Kegiatan penyuluhan pertanian bukan lagi merupakan kegiatan pendidikan tetapi kegiatan pemberdayaan petani dan keluarganya untuk bersedia merubah perilaku mereka. Selain menyangkut tentang kegiatan penyuluhan, dengan adanya Undang-Undang tersebut kelembagaan penyuluhan juga telah diatur sehingga tugas dan fungsi dari penyuluhan menjadi lebih jelas. Pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan, di tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan, di tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan, dan di tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.

Di era Otonomi Daerah dewasa ini, dunia penyuluhan “resah”, terlebih pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang sudah ditata dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalami perubahan-perubahan, baik dalam bentuk penataan ulang atau ditiadakannya beberapa kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang selama ini sudah berfungsi dengan baik. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dewasa ini di era Otonomi Daerah sedang mengalami disorganisasi. Bergulirnya Era Reformasi pada tahun 2001 yang diikuti dengan kebijakan Otonomi Daerah yang membawa konsekuensi terjadinya perubahan Organisasi Perangkat Daerah, Kelembagaan Penyuluhan Pertanian BIPP mengalami perubahan menjadi bermacam-macam bentuk kelembagaan di masing-masing daerah. Kelembagaan BIPP yang dengan susah payah dibangun dalam kurun waktu yang cukup panjang dirubah menjadi beberapa versi yang berbeda di tiap daerah (BIP, UPTD, Sub-Dinas), bahkan ada yang dibubarkan.

UPTD Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan (UPTD HPT dan Keswan) yang sebelumnya bernama Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (UPT BKP3), akan tetapi pada bulan Februari 2019 telah berganti nama menjadi UPTD HPT dan Keswan. Perubahan nama tersebut terjadi karena telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan tersebut tidak mengubah tugas dan fungsi penyuluh, hanya penyederhanaan Satuan Kerja Perangkat (SKP) serta menyebabkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan koordinasi pelaksana tugas akan beralih dari Badan Penyuluhan ke Dinas Pertanian. Akan tetapi perubahan nama kelembagaan tersebut tidak merubah tugas dan fungsi serta kinerja dari penyuluh itu sendiri sebab penyuluh pertanian tersebut merupakan jabatan fungsional jadi hak kepegawaian dan kepegawaiannya tetap mengacu kepada peraturan tentang jabatan fungsional yang sudah berlaku sebelumnya dan yang berubah hanyalah masalah administrasi saja, bukan masalah teknis, sehingga perubahan SKP tersebut sama sekali tidak akan mengganggu tugas dan fungsi penyuluh pertanian sebagai pendamping dan pembina petani.

Berdasarkan uraian di atas, perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai **“Profil Kelembagaan dan Kajian Kinerja Penyuluhan di UPTD Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Jonggat”**.

Hayati, R., Suadnya I Wayan., dan Sahidu Arifuddin

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu penyuluh dan petani yang berada di wilayah kerja UPTD Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Jonggat. Penelitian dilakukan di wilayah kerja UPTD Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan (UPTD HPT dan Keswan) Kecamatan Jonggat, dari 13 desa binaan dipilih hanya 3 desa. Jumlah responden yaitu sebanyak 48 orang, 3 responden penyuluh dan 45 responden petani yang menjadi kelompok binaan penyuluh, serta 1 orang koordinator penyuluh sebagai *key informant*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan sekunder. Cara pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode skoring.

Adapun variabel dalam penelitian ini antara lain:

A. Profil Kelembagaan Penyuluhan

1. Struktur
2. Sumber Daya Manusia
3. Pembiayaan

B. Kinerja Penyuluhan

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Evaluasi

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mengacu pada kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan metode skoring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Umur Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan umur responden penyuluh terdapat pada kisaran umur 45-59 tahun, artinya semua responden penyuluh berada pada usia produktif. Sedangkan umur responden petani yang paling banyak yaitu pada kisaran umur 45-59 tahun sebanyak 26 orang (57,78%), kisaran umur menengah yaitu kisaran 30-44 tahun sebanyak 17 orang (37,78%), dan kisaran umur paling sedikit yaitu kisaran 15-29 tahun sebanyak 2 orang (4,44%).

Tingkat Pendidikan Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden penyuluh berada pada tingkat pendidikan yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yakni pada Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 2 orang (67%) sedangkan 1 orang (33%) berada pada tingkat SMA. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden penyuluh sudah baik sehingga dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan untuk melaksanakan tugas kepenyuluhan.

Sedangkan responden petani diketahui memiliki tingkat pendidikan yang terdiri dari TTSD yaitu 2 orang (4,44%), SD yaitu 1 orang (2,22%), SMP 7 orang (15,56%), SMA yaitu 25 orang (55,56%), dan PT yaitu 10 orang (22,22%).

Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga 1-2 pada responden penyuluh yaitu sebanyak 1 orang (33%), sedangkan pada responden petani sebanyak 13 orang (29%). Jumlah tanggungan keluarga 3-4 adalah responden penyuluh sebanyak 2 orang (67%), responden petani sebanyak 27 orang (29%). Sedangkan jumlah tanggungan keluarga lebih dari 4 orang terdapat pada responden petani yaitu sebanyak 5 orang (11%).

Pengalaman Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman penyuluh dalam bidang penyuluhan yang berkisar lebih dari 20 tahun menunjukkan bahwa rata-rata responden penyuluh telah memiliki pengalaman yang lama dalam menjalankan tugas penyuluhan, sehingga dapat menunjang dalam kinerja yang baik sebagai penyuluh. Pada responden petani dapat dilihat bahwa sebagian besar petani responden berada pada tingkat pengalaman 10-20 tahun, yaitu sebanyak 29 orang dengan persentase (64,44%), sedangkan untuk pengalaman petani yang lebih dari 20 tahun yaitu sebanyak 12 orang dengan persentase (26,67%). Tetapi ada petani responden yang memiliki pengalaman kurang dari 10 tahun, yaitu sebanyak 4 orang dengan persentase (8,89%).

Profil Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Jonggat

Profil Kelembagaan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah terletak di wilayah Kota Praya. Kelembagaan penyuluhan ini tidak terlepas dari perubahan kebijakan serta arah tanggung jawab dalam pelaksanaan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Lombok Tengah dulunya bernama Dinas Pertanian dan Peternakan, akan tetapi pada Januari 2017 berganti nama menjadi Dinas Pertanian hingga kini. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah merupakan gabungan dari beberapa dinas yang melaksanakan urusan pertanian. Dinas-dinas tersebut adalah Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Badan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Sebelum berganti nama, Dinas Pertanian memiliki 5 bidang akan tetapi sekarang memiliki 6 bidang yaitu Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Bidang Penyuluhan. Sedangkan untuk strukturnya terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat Dinas yang dipimpin oleh sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Bidang Sarana dan Prasarana. Akan tetapi dengan diubahnya nama

kelembagaan tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap struktur maupun sistem penyuluhan yang sudah ada.

Sumber Daya Manusia

Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah saat ini dipimpin oleh kepala dinas yang membawahi sekretaris yang terdiri dari subag perencanaan, subag keuangan dan subag umum dan kepegawaian. Adanya 6 bidang yaitu sarana dan prasarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan bidang penyuluhan. Adanya Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), serta adanya Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala dinas dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang.

Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan mendapatkan alokasi anggaran yang naik turun dari tahun ke tahun, namun untuk penyelenggaraan penyuluhan yang berkaitan dengan UPTD HPT dan Keswan Kecamatan Jonggat tidak terdapat anggaran kegiatan penyuluhan yang diberikan hanya berupa penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) saja.

Profil Kelembagaan UPTD Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Jonggat Tahun 2020

UPTD Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan (UPTD HPT dan Keswan) Kecamatan Jonggat merupakan salah satu kelembagaan penyuluhan pemerintah di Kabupaten Lombok Tengah yang mewadahi penyuluh lapangan dalam melaksanakan tugas-tugas penyuluhan.

UPTD Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan (UPTD HPT dan Keswan) yang sebelumnya bernama Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (UPT BKP3), akan tetapi pada bulan Februari 2019 telah berganti nama menjadi UPTD HPT dan Keswan. Perubahan nama tersebut terjadi karena telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Setelah terjadi perubahan nama kelembagaan tersebut, tentunya akan ada perubahan yang terjadi di dalam UPTD HPT dan Keswan itu sendiri. Perubahan tersebut berupa perubahan pada lembaga yang menaunginya. Sebelumnya, Balai Penyuluhan tersebut berada di bawah naungan Badan Penyuluh. Akan tetapi setelah berganti nama Balai Penyuluhan tersebut berada di bawah naungan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu struktur kepengurusan di Balai Penyuluh tersebut juga berubah. Ketika namanya BKP3 hanya ada struktur fungsional saja, yang dimana struktur tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Penyuluh dan membawahi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Akan tetapi setelah menjadi UPTD HPT dan Keswan strukturnya menjadi 2 yaitu ada struktur yang bersifat struktural dan struktur fungsional. Struktur yang bersifat struktural terdiri dari Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, dan Pegawai. Sedangkan untuk struktur fungsionalnya terdiri dari Koordinator Penyuluh dan PPL.

Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia yang handal mendorong terlaksananya kegiatan yang akan dilakukan, dimana penyuluh memiliki tanggung jawab serta wewenang

masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyuluh dalam kegiatan penyuluhan. Tercukupinya tenaga penyuluh yang ada di UPTD HPT dan Keswan di Kecamatan Jonggat, dimana 1 penyuluh membina 1 WKPP, serta staf paramedis dan staf administrasi yang mumpuni sehingga tidak ada pegawai yang memiliki pekerjaan yang ganda.

Pembiayaan

Pembiayaan dalam penyelenggaraan penyuluhan tentu akan berpengaruh pada pelaksanaan penyuluhan yang menjadi fungsi utama UPTD HPT dan Keswan Kecamatan Jonggat. Pembiayaan yang diberikan tidak selalu sama tiap tahunnya, terkadang mengalami peningkatan bahkan mengalami penurunan anggaran. Pembiayaan yang ada di UPTD HPT dan Keswan Kecamatan Jonggat yaitu berupa pembiayaan operasional yang berasal dari departemen pertanian, serta pembiayaan operasional penyuluhan yang dulunya berasal dari Dinas Pertanian Kecamatan Jonggat, akan tetapi sekarang sudah tidak tersedia lagi.

Kinerja Penyuluhan

Tabel 4.1 Kinerja Penyuluhan di UPTD HPT dan Keswan Kecamatan Jonggat

Kinerja Penyuluhan	Kategori	Modus Skor	
		Penyuluh	Petani
Tahap Perencanaan	Baik (14-18)		
	Sedang (10-13)	18	14
	Kurang Baik (6-9)		
Tahap Pelaksanaan	Baik (48-60)		
	Sedang (34-47)	56	55
	Kurang Baik (20-33)		
Tahap Evaluasi	Baik (14-18)		
	Sedang (10-13)	16	10
	Kurang Baik (6-9)		
Total Capaian Modus	Baik (76-96)		
	Sedang (54-75)	90	79
	Kurang Baik (32-53)		

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa kinerja penyuluhan di UPTD Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan di Kecamatan Jonggat secara umum berada pada kategori baik pada setiap tahapan. Baik itu pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun pada tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan responden penyuluh memiliki modus skor sebesar 18 termasuk kategori baik sedangkan responden petani memiliki modus skor sebesar 14 termasuk kategori baik. Adanya perbedaan skor modus antara responden penyuluh dan petani pada tahap perencanaan ini dikarenakan penyuluh telah melaksanakan secara maksimal kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab penyuluh pada tahap perencanaan akan tetapi terdapat beberapa kegiatan pada tahap perencanaan tersebut yang tidak melibatkan anggota kelompok tani dan hanya melibatkan pengurus kelompok tani dan penyuluh saja.

Pada tahap pelaksanaan responden penyuluh memiliki modus skor sebesar 56 termasuk kategori baik, sedangkan responden petani memiliki modus skor sebesar 55 termasuk kategori baik. Adanya perbedaan skor modus antara responden penyuluh Hayati, R., Suadnya I Wayan., dan Sahidu Arifuddin

dan petani pada tahap pelaksanaan ini dikarenakan penyuluh telah melaksanakan secara maksimal kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab penyuluh pada tahap pelaksanaan tersebut akan tetapi penyuluh terkadang memiliki kendala dan hambatan yang dapat mempengaruhi setiap kegiatan seperti terkendala waktu dikarenakan selain menjadi petani para anggota tani juga memiliki pekerjaan lain, sehingga jadwal kegiatan penyuluhan yang sudah ditentukan sebelumnya jadi tidak terlaksana sesuai dengan jadwal. Selain itu kurangnya informasi dari pengurus kelompok maupun anggota kelompok lainnya terkait pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh, sehingga petani seringkali tidak mengetahui adanya kegiatan penyuluhan dan membuat petani jadi tidak terlibat dalam kegiatan penyuluhan tersebut.

Sedangkan pada tahap evaluasi responden penyuluh memiliki modus skor sebesar 16 termasuk kategori baik, sedangkan responden petani memiliki modus skor sebesar 10 termasuk kategori kurang baik. Adanya perbedaan skor modus antara responden penyuluh dan petani pada tahap evaluasi tersebut dikarenakan pada tahap evaluasi hanya dilakukan oleh penyuluh saja tanpa melibatkan petani, akan tetapi petani mengetahui bahwa penyuluh telah melaksanakan kegiatan evaluasi tersebut.

Hasil penelitian terkait kinerja penyuluhan yang dilakukan melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap evaluasi serta sejauh mana kontribusi petani dalam kegiatan penyuluhan. Hasil penelitian terkait tahapan penyelenggaraan penyuluhan dalam menunjang kinerja penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

Responden Penyuluh

Tabel 4.2 Sebaran Penyuluh Responden Menurut Kegiatan pada Tahap Perencanaan Penyuluhan di UPTD HPT dan Keswan Kecamatan Jonggat Tahun 2020

Tahap Perencanaan	Kategori					
	Baik		Cukup Baik		Kurang Baik	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Identifikasi Potensi Wilayah	3	100	-	-	-	-
Penyusunan Programa	3	100	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Kerja	3	100	-	-	-	-

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua responden penyuluh yaitu sebanyak 3 orang (100%) pada tahap perencanaan berada pada kategori baik. Pada tahap perencanaan terdapat tiga kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh di daerah kerja masing-masing. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu kegiatan identifikasi potensi wilayah. Kegiatan identifikasi potensi wilayah adalah proses penggalan data, meliputi pembuatan data potensi wilayah dan agroekosistem yang terdiri dari peta wilayah kerja, peta potensi wilayah, dan monografi wilayah kerja, serta untuk mengetahui pemanfaatan lahan pertanian terkait dengan luas lahan dan komoditi usahatani yang ditekuni oleh petani. Proses penggalan data dilakukan dengan cara mengambil data dari petani dan desa.

Kegiatan kedua yang dilakukan pada tahap perencanaan yaitu penyusunan programa penyuluhan. Penyusunan programa penyuluhan disusun secara berjenjang yaitu mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga ke tingkat nasional. Dalam penyusunan programa penyuluhan

ini semua responden penyuluh sebanyak 3 orang (100%) melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk mengetahui keadaan umum wilayah dilakukan dengan cara melihat hasil kegiatan identifikasi potensi wilayah yang telah dilakukan, setelah mengetahui bagaimana hasil dari identifikasi potensi wilayah barulah dilakukan Rembuk Tani. Rembuk Tani dihadiri oleh pengurus dari kelompok tani, dan pada saat rembuk tani ini ditentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Apabila kegiatan-kegiatan yang telah disusun belum dapat terlaksana pada tahun tersebut, maka akan diprogramkan kembali ditahun berikutnya.

Kegiatan ketiga yang dilakukan pada tahap perencanaan yaitu penyusunan rencana kerja. Dalam kegiatan penyusunan rencana kerja semua responden sebanyak 3 orang (100%) telah melakukan kegiatan tersebut. Penyusunan rencana kerja dilakukan setelah penyusunan programa penyuluhan, kedua kegiatan ini dilakukan secara bersamaan pada rembuk tani..

Responden Petani

Tabel 4.3 Sebaran Petani Responden Menurut Kegiatan pada Tahap Perencanaan Penyuluhan di UPTD HPT dan Keswan Kecamatan Jonggat Tahun 2020

Tahap Perencanaan	Kategori					
	Baik		Cukup Baik		Kurang Baik	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Identifikasi Potensi Wilayah	45	100	-	-	-	-
Penyusunan Program	18	40	-	-	27	60
Penyusunan Rencana Kerja	18	40	-	-	27	60

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan terdapat kegiatan yang dilakukan petani dengan penyuluh. Adapun kegiatan pertama yang dilakukan yaitu identifikasi potensi wilayah. Pada kegiatan ini informasi yang diberikan oleh petani kepada penyuluh terkait dengan informasi pemanfaatan lahan pertanian yang meliputi luas lahan dan komoditi unggulan yang ditekuni petani. Dalam memperoleh informasi, penyuluh melakukan wawancara langsung kepada petani dan memberikan form terkait dengan kegiatan identifikasi potensi wilayah. Adapun isi form yang diberikan berisi nama, komoditi unggulan, jumlah tanggungan keluarga, dan luas lahan garapan atau jumlah ternak yang dimiliki. Pada kegiatan identifikasi potensi wilayah ini semua responden petani sebanyak 45 orang (100%) menyatakan bahwa telah mengisi form yang telah diberikan oleh penyuluh.

Pada tahap perencanaan selanjutnya yaitu penyusunan programa penyuluhan. Pada kegiatan ini responden petani sebanyak 18 orang (13%) termasuk dalam kategori baik atau terlibat dalam kegiatan tersebut, sedangkan 39 orang (87%) termasuk dalam kategori kurang baik atau tidak terlibat dalam kegiatan penyusunan programa penyuluhan. Hal ini dikarenakan penyusunan programa penyuluhan hanya dihadiri oleh perwakilan dalam kelompok yaitu ketua dan sekretaris kelompok, sedangkan anggota kelompok lainnya tidak ikut terlibat. Dalam penyusunan programa penyuluhan, penyuluh menyampaikannya dengan metode ceramah dan diskusi bersama pengurus kelompok, sehingga memudahkan dalam menyusun program yang akan dilakukan.

Pada tahap perencanaan juga terdapat kegiatan penyusunan rencana kerja. Pada kegiatan ini responden petani sebanyak 18 orang (40%) termasuk dalam kategori

baik atau terlibat dalam kegiatan tersebut, sedangkan 27 orang (60%) termasuk dalam kategori kurang baik atau tidak terlibat dalam kegiatan penyusunan rencana kerja. Kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan setelah penyusunan program sehingga petani yang hadir pada kegiatan ini sama yaitu hanya ketua dan sekretaris kelompok. Pada kegiatan ini, perwakilan kelompok yang hadir akan menyampaikan kembali hasil penyusunan rencana kerja kepada anggota kelompok yang lain.

Tahap Pelaksanaan

Responden Penyuluh

Tabel 4.4 Sebaran Penyuluh Responden Menurut Kegiatan pada Tahap Pelaksanaan Penyuluhan di UPTD HPT dan Keswan Kecamatan Jonggat Tahun 2020

No	Tahap Pelaksanaan	Kategori					
		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)
1	Penyusunan Materi Penyuluhan	3	100	-	-	-	-
2	Melakukan Kunjungan	3	100	-	-	-	-
3	Melakukan Uji Coba Lapangan Melakukan Demonstrasi	3	100	-	-	-	-
4	Cara/Hasil	3	100	-	-	-	-
5	Melakukan Kegiatan Temu	3	100	-	-	-	-

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan terdapat lima kegiatan yang dilakukan. Kegiatan pertama yaitu penyusunan materi penyuluhan, semua penyuluh yaitu sebanyak 3 orang (100%) melaksanakan kegiatan tersebut. Materi penyuluhan yang disampaikan diperoleh dari berbagai sumber seperti media cetak, internet maupun dari balai penelitian pertanian yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan petani. Penyampaian materi penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi.

Kegiatan selanjutnya pada tahap pelaksanaan penyuluhan yaitu melakukan kunjungan. Pada kegiatan kunjungan responden penyuluh sebanyak 3 orang (100%) melakukan kunjungan kepada kelompok tani binaan dari wilayah kerja masing-masing. Jadwal kunjungan tersebut disusun untuk jangka waktu satu tahun. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali jadwal yang sudah ditentukan tidak terlaksana dengan baik, karena anggota kelompok lain memiliki kegiatan lain serta penyuluh yang sering memiliki kegiatan tambahan lain yang harus segera diselesaikan. Kegiatan kunjungan biasanya dilakukan di posko pertemuan, rumah ketua kelompok tani tergantung keberadaan petani yang disesuaikan oleh penyuluh.

Pada kegiatan Uji Coba Lapangan ini responden penyuluh yaitu sebanyak 3 orang (100%) melakukan kegiatan uji coba lapangan. Kegiatan uji coba lapangan biasanya dilakukan di awal musim namun tergantung juga pada komoditas yang digunakan. Kegiatan uji coba biasanya dilakukan sebanyak satu atau 2 kali dalam setahun, dan biasanya dilakukan di masing-masing daerah binaan khususnya dilahan milik petani.

Pada kegiatan demonstrasi cara/hasil, responden penyuluh sebanyak 3 orang (100%) melaksanakan kegiatan demonstrasi cara/hasil. Demonstrasi cara/hasil yang dilakukan lebih menekankan pada teknis dalam usahatani, penggunaan teknologi alat dan mesin pertanian, benih varietas unggul, cara memilih alternatif jenis budidaya yang cocok setiap tahunnya serta prosedur atau cara memelihara ketahanan hasil panen yang bagus. Kegiatan demonstrasi tersebut dilakukan melibatkan pengurus kelompok tani dan kegiatan ini memiliki jadwal, akan tetapi pada pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Kegiatan selanjutnya pada tahap pelaksanaan yaitu kegiatan temu. Pada kegiatan ini, semua responden penyuluh yaitu sebanyak 3 orang (100%) melakukan kegiatan tersebut. Adapun kegiatan temu yang dilakukan yaitu temu wicara, temu lapang, dan temu karya. Kegiatan temu wicara seringkali diadakan di sekretariat kelompok tani dan biasanya dilakukan dengan melakukan diskusi atau pertemuan dengan petani, biasanya penyuluh mendatangkan narasumber baik dari petani maupun tenaga ahli guna membahas terkait permasalahan yang dialami petani dalam usahatani sehingga penyuluh dan tenaga ahli tersebut dapat memberikan solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi petani. Kegiatan temu lapang biasanya dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi yang ada dilapangan, adapun contoh dari kegiatan temu lapang yaitu seperti pada kegiatan demonstrasi cara/hasil.

Responden Petani

Tabel 4.5 Sebaran Petani Responden Menurut Kegiatan pada Tahap Pelaksanaan Penyuluhan di UPTD HPT dan Keswan Kecamatan Jonggat Tahun 2020

No	Tahap Pelaksanaan	Kategori					
		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)
1	Penyusunan Materi Penyuluhan	44	98	1	2	-	-
2	Melakukan Kunjungan	37	82	7	16	1	2
3	Melakukan Uji Coba Lapangan Melakukan Demonstrasi	39	87	6	13	-	-
4	Cara/Hasil	40	89	5	11	-	-
5	Melakukan Kegiatan Temu	31	69	14	31	-	-

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada kegiatan penyusunan materi penyuluhan, responden petani sebanyak 44 orang (98%) berada pada kategori baik atau menyatakan bahwa penyuluh telah menyampaikan materi penyuluhan dengan baik yang disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi petani, dan sebanyak 1 orang (2%) berada pada kategori cukup baik.

Pada kegiatan kunjungan, responden petani sebanyak 37 orang (82%) baik yang berarti bahwa penyuluh melakukan kegiatan kunjungan kepada petani dan terdapat jadwal kunjungan bersama dengan penyuluh yakni 1 sampai 2 kali dalam sebulan per kelompok tani. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 7 orang (16%) berada pada kategori cukup baik, dan 1 orang (2%) berada pada kategori kurang baik. Mereka menyatakan tidak terdapat jadwal kunjungan yang dilakukan oleh penyuluh.

Pada kegiatan uji coba lapangan, responden petani sebanyak 39 orang (87%) berada pada kategori baik, dan 6 orang (13%) berada pada kategori cukup baik. Petani menyatakan bahwa kegiatan uji coba pernah dilakukan meskipun pelaksanaannya hanya 1 hingga 2 kali dalam satu tahun sesuai dengan program yang ada. Kegiatan uji coba memang jarang dilakukan dikarenakan bergantung pada adanya inovasi yang akan diuji coba. Kegiatan uji coba biasanya dilakukan lahan anggota kelompok tani dengan mengikutsertakan petani perwakilan dari kelompok.

Pada kegiatan demonstrasi cara/hasil, responden petani sebanyak 40 orang (89%) menyatakan bahwa terdapat kegiatan demonstrasi yang dilakukan bersama dengan penyuluh. Selain itu 5 orang (11%) menyatakan bahwa tidak ada kegiatan demonstrasi, hal ini dapat dikarenakan kegiatan demonstrasi memang jarang dilakukan, dan penyuluh seringkali hanya melakukan kegiatan demonstrasi ini di sebagian kelompok binaanya, sehingga kelompok yang lainnya belum memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan.

Kegiatan pada tahap pelaksanaan penyuluhan selanjutnya yaitu kegiatan temu. Responden petani sebanyak 31 orang (69%) menyatakan adanya kegiatan temu dan terdapat jadwal pada kegiatan temu tersebut, sedangkan 14 orang (31%) menyatakan terdapat jadwal temu akan tetapi tidak terdapat jadwal pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatan temu yang sering dilakukan yaitu temu wicara dan temu lapang. Temu wicara dilakukan setiap penyuluh melaksanakan kunjungan ke rumah-rumah anggota kelompok tani untuk membahas permasalahan baik dalam usahatani maupun permasalahan dalam kelompok. Kegiatan temu lapang juga merupakan kegiatan yang sering dilakukan, karena pada kegiatan temu lapang penyuluh dapat melihat secara langsung bagaimana keadaan dari usahatani petani, adapun kegiatan temu lapang ini biasanya dilakukan di sawah milik petani.

Tahap Evaluasi

Responden Penyuluh

Tabel 4.7 Sebaran Penyuluh Responden Menurut Kegiatan pada Tahap Evaluasi Penyuluhan di UPTD HPT dan Keswan Kecamatan Jonggat Tahun 2020

No	Tahap Evaluasi	Kategori					
		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)
1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan	3	100	-	-	-	-
2	Penyuluhan	3	100	-	-	-	-

Sumber: *Data Primer Diolah, 2020*

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada tahap evaluasi yang meliputi evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pelaporan hasil penyuluhan, diketahui bahwa semua responden penyuluh yaitu sebanyak 3 orang (100%) melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan untuk mengetahui dan menilai seberapa besar persentase keberhasilan dari program serta rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap evaluasi penyuluh melakukan evaluasi terkait dengan kegiatan penyuluhan tanpa melibatkan petani.

Setelah mengetahui hasil pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan, selanjutnya dilakukan pembuatan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan yang mana dengan adanya laporan tersebut dapat menjadi bukti bahwa telah dilaksanakannya berbagai kegiatan penyuluhan beserta capaian hasilnya yang dapat menunjang kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas penyuluhan. Pada tahap evaluasi penyuluh melakukan evaluasi terkait dengan kegiatan penyuluhan yang melibatkan petani.

Responden Petani

Tabel 4.8 Sebaran Petani Responden Menurut Kegiatan pada Tahap Evaluasi Penyuluhan di UPTD HPT dan Keswan Kecamatan Jonggat Tahun 2020

No	Tahap Evaluasi	Kategori					
		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)
1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Penyuluhan	-	-	-	-	45	100
2	Pelaporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan	-	-	-	-	45	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa pada tahap evaluasi yang meliputi evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan, diketahui bahwa 45 orang (100%) tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan. Hal ini dikarenakan pada tahap evaluasi hanya dilakukan oleh penyuluh tanpa melibatkan petani, akan tetapi petani mengetahui bahwa penyuluh telah melakukan kegiatan evaluasi tersebut. Dalam tahap evaluasi penyuluh yang melakukan penilaian terkait tingkat keberhasilan dari program dan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Dengan demikian dinyatakan bahwa, responden petani memiliki keterlibatan dengan penyuluh hanya pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, sedangkan pada kegiatan evaluasi dikhususkan hanya untuk penyuluh saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada tujuan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profil kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa secara struktur sudah cukup jelas karena sudah ditata dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, meskipun terjadi beberapa perubahan karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat kabupaten yaitu Dinas Pertanian yang di dalamnya terdapat bidang penyuluhan, dan pada tingkat kecamatan berbentuk UPTD Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Jonggat yang salah satu unitnya yaitu unit penyuluhan yang mendukung bagi terlaksananya

pengelolaan organisasi penyuluhan yang efektif. Selain itu data hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kelembagaan penyuluhan didukung dengan sumber daya manusia yang handal meskipun hanya didukung dengan anggaran yang terbatas dalam merealisasikan kegiatan penyuluhan.

2. Hasil analisis terhadap kinerja penyuluhan menunjukkan bahwa kinerja penyuluhan di UPTD HPT dan Keswan Kecamatan Jonggat adalah termasuk dalam kategori baik pada tiap tahapannya yang ditunjukkan oleh berlangsungnya proses perencanaan penyuluhan yang partisipatif, implementasi rencana yang cukup efektif, serta adanya kegiatan evaluasi dan pelaporan hasil penyuluhan yang dilakukan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Kepada pemerintah diharapkan tetap memfasilitasi dukungan sarana dan prasarana serta anggaran untuk pelaksanaan penyuluhan dalam meningkatkan kinerja lembaga penyuluhan..
2. Diharapkan kelembagaan penyuluhan dapat mempertahankan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardita, *et.al.*. 2017. *Kinerja Penyuluh Pertanian Menurut Persepsi Petani: Studi Kasus di Kecamatan Landak*. (Diakses tanggal 5 Februari 2020).
- Badan Pusat Statistika. 2019. *Kecamatan Jonggat Dalam Angka 2019*. BPS Kecamatan Jonggat. Nusa Tenggara Barat.
- Burhanudin. 2019. *Profil Kelembagaan dan Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan di Kabupaten Lombok Timur Kasus di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian (UPT-PP) Kecamatan Sukamulia*. [Skripsi]. Universitas Mataram. Nusa Tenggara Barat.
- Charine, Anne. 2015. *Kajian Kinerja Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat*. (Diakses tanggal 5 Februari 2020).
- Lesmana, D. 2007. *Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian Kota Samarinda*. Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- Marliati, *et.al.*. 2008. *Faktor-Faktor Penentu Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Memberdayakan Petani (Kasus di Kabupaten Kampar Provinsi Riau)*. (Diakses tanggal 5 Februari 2020).
- Nova, *et.al.*. 2011. *Kajian Kinerja Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan murang Timur*. (Diakses tanggal 5 Februari 2020).
- Paisal, Doni. 2015. *Pengertian Profil*. *repository.usu.ac.id*. (Diakses tanggal 11 Februari 2020).
- Sahidu, Arifuddin. 2016. *Penyuluhan Dalam Dinamika Pertanian: Retrospeksi Perjalanan Panjang Penyuluhan Pertanian. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar (Profesor) Tetap Dalam Bidang Ilmu Penyuluhan Pertanian Pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram Diucapkan Di Depan Rapat Terbuka Senat Universitas Mataram Rabu, 28 Desember 2016*. Universitas Mataram.
- Hayati, R., Suadnya I Wayan., dan Sahidu Arifuddin